

# **ELITE NU DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL**

**(Studi pada PEMILUKADA di Kabupaten Sumenep Tahun 2010)**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENDAPATKAN GELAR SERJANA  
STRATA SATU PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh;  
**NURFAIZIN**  
**06720002**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIRA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

nama : **Nurfaizin**

NIM : 06720002

angkatan : 2006

adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“Elite NU dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Pada Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010)”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Munaqosah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi menurut aturan yang berlaku jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim skripsi yang ditunjuk oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, apabila terdapat bukti plagiat ada atau terjadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

*Wallahu al-Muwaafiq Ilaa aqwaami At-thaariq*

dibuat di : Yogyakarta

pada tanggal: 01 Nopember 2011

Yang membuat pernyataan

**Nurfaizin**

**NIM: 06720002**



UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

PRODI SOSIOLOGI

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi/Tugas Akhir

Lamp. : 4 bundel Skripsi

Kepada yang terhormat  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Nurfaizin**  
NIM : 06720002  
Judul Skripsi : **Elite NU dalam Dinamika Politik Lokal  
(Studi Pada Pemilukada Kabupaten Sumenep  
Tahun 2010)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 01 November 2011  
Pembimbing,

**Drs. Mochamad Sodik, M. Si**

NIP: 19680416 1995 1004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**



Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 585300 Fax. 519571 Yogyakarta 55281

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DHS/PP.00.9/.....a/2011

Skripsi/tugas Akhir dengan judul : Elite NU dalam Dinamika Politik Lokal  
(Studi Pada Pemilukada Kabupaten  
Sumenep Tahun 2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Faizin

NIM : 06720002

Telah dimunaqasahkan pada : Senin, tanggal 14 November 2011

Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN  
Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:  
Ketua Sidang,

**Dr. Mohammad Sodik, M.Si**  
NIP: NIP: 19680416 1995 03 1 004

Penguji I

**Dr. Musa, M.Si**  
NIP: 19680416 1995 03 1 004

Penguji II

**Dadi Nurhaedi, M.Si**  
NIP: 19711212 199703 1 002

**MOTTO**

***YANG MUDA LAWAN KORUPSI***  
***(Gerakan Pemuda Melawab Korupsi, 2010)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**



*Emak* Hj. Yatimah tersayang  
*Epak* H. Roji Fawaid Baidlawi Ayahanda sekaligus *sang* guru  
*Kak* Mufidul Wara  
dan kedua *alek* tersayang Badrul Arifin dan Zainul Muqit

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam terlimpah kepada Baginda Rasulullah Saw., manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis yang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Elite NU dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Pada Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010)**”. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan arahan dan kritikan yang sifatnya membangun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, *Epak H. Roji Fawaid Baidlawi* dan *Emak Hj. Yatimah* yang telah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penuh tanggung jawab. Saudara- saudara kandung penulis, *Kak Mufidul Wara*, maaf adinda wisuda duluan. *Lek Badrul Arifin*, *Lek Zainul Muqit*, kenali potensi kalian dan taklukkan “dunia”. Kemudian kepada keluarga besar Bani Thaha *khususnya* Mak Icak dan Om Dayat terima kasih untuk perhatian dan kasih sayangnya . Juga sahabat- sahabat sekaligus keluargaku, Qurnain, BJ Sujibto, Irul, Wely, Adam dan Cak Dul, hidup ternyata sederhana ya, sekedar belajar secukupnya, selebihnya kita hura hura.

Secara akademik, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Mohammad Shodik, M. Si., selaku dosen pembimbing sekaligus Guru Spitual penulis yang telah merelakan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses masa menjadi mahasiswa dan penyelesaian skripsi ini, meskipun sedang disibukkan oleh aktivitasnya yang cukup padat.

Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. Musa Asyari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Dudung Adurrahman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dadi Nurhaedi, M. Si., Ketua Program Studi Sosiologi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis,



yang tidak bosan-bosan meluangkan waktunya untuk mempertimbangkan judul-judul skripsi yang penulis ajukan, dan seluruh dosen di Program Studi Sosiologi yang telah memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada penulis di atas lautan ilmu yang tak bertepi.

Penulis ucapkan terimakasih pula kepada *Assabiqunal Awwaliin* di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dr. KH.Malik Madany Katib A'am PBNU, support doanya begitu terasa penulis rasakan dalam jejak langkah gerakan. Slamet Effendi Yusuf, pertemuan dan diskusi singkatnya sedikit mengubah cara pandang penulis. *Cak Rozaqi*, M.Si, terima kasih atas ide-ide gilanya, sehingga penulis berani bermimpi lebih dari yang mimpi pemuda-pemuda lainnya, Kang Eman Hermawan, Mas, sungguh beruntung kami mempunyai pendahulu seperti anda manusia tak terbatas umur. Mas Zaini Rahman, terima kasih Mas telah membuka mata kami dalam pergaulan dunia yang sebenarnya. Koorwil KMNU DIY Umaruddin Masdar, *Jenengan* lebih dari sekedar orang tua tapi juga bisa jadi guru sekaligus teman untuk berbagi apa aja Mas, sosok dengan pribadi hangat ada dalam diri *Jenengan!!!*. Anwar Angasoto, denganmu aku raih sebagian mimpiku. Mas Rofiqul Umam Staf Ahli Menkumham RI yang telah membimbing penulis untuk menjadi kader gerakan yang mandiri dan ikhlas. Pak Sukanto, S.H.(Ketua FPKB DPRD DIY),terima kasih Bapak atas segala bantuannya selama penulis aktif dalam dunia keaktifisan.

Kepada Sahabat- sahabat PMII se- DIY, khususnya para “pembesar” Rayon Humaniora Park, Korp Roma Irama: Jauhari, maaf Jo kalau saya sering tidak sependapat denganmu, tapi bukankah dari perbedaan-perbedaan itu kita jadi dekat. Si jorok Erwin Dz, selamat Sob, saya dengar kamu sudah jadi pendidik ya di Pulau Borneo sana? Selamat lah, tapi jangan jadi guru cabul ya,ups!! Sarjono si idealis, sebuah kelompok niscaya ada orang-orang dengan idealitas sepertimu cuy! Dan si *Play Boy* alim Zamroni, sudah berapa anak gadis menangisimu, Zam? Punggawa Korp Palang: Samsul, rimbamu semakin tak jelas om. Munir, pribadi hangat dengan selera humor yang rendah. Kimok, cepat lulus cuy, jangan sampai dikejar adikmu. Asep, pribadi sok gawat dengan semangat membara, FIGHT!!!!. Khafi, kapan-kapan saya boleh pinjam cincin saktimu kan? Ayenk, sosok pedofile



tapi setia. Agus, agus kesetianmu dalam bersahabat tak ada duanya walaupun kadang saya beberapa kali menipumu, sorry! Mbah Ipul, jangan terlena dengan hitamnya kopi Pul, jalan masih panjang. Nonok yang sok alim, Wulan, sosok sederhana tapi sangat loyal, itu dibuktikanmu ketika kita sama-sama mengurus BEM FISHUM. Rizky F, semoga kamu bahagia dengan Gusmu. Eka Yuli, semoga langgeng ya sama Mbah Ipul. Korp Semar: Pres Khalid, yakinlah dengan potensimu tapi ingat egomu dikontrol dikit. Fathoel, seribu terima kasih ku haturkan padamu, intelektual muda dengan produktivitas luar biasa. Oong, sosok perfeksionis yang jorok tapi rapi. Nik Rasyid, pribadimu sungguh luar biasa taretan, satu kata untukmu, SALUT. Alim, pendiam tapi bergejolak. Anas, luar biasa kamu Nas, satu-satunya kader Fishum yang jadi tokoh nasional yang sesungguhnya. Badi, Wiwik, Evi dan si manja Fikryah, kalian generasi hebat tapi sayang suka berantem. Korp Karpet: Aman Juragan, Hasan, Safar si Kancil, duo Amel, dan lain-lain, semoga tetap semangat dalam bergerak. Dan kepada semua kader PMII UIN Sunan Kali Jaga yg lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semua dialektikanya selama menempuh lautan ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kawan- kawan pengurus BEM FISHUM periode 2008-2010, terima kasih atas support dan dedikasinya, tanpa kalian semua akan jadi terasa sulit.

Dan kepada kawan-kawan ketua BEM FISIP dan FIS se Indonesia yang turut mendeklarasikan Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK), yakinlah Indonesia(akan) jaya di tangan kita para pemuda anti korupsi.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini dipertanggung jawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 01 Nopember 2011

## DAFTAR TABEL

✓ Tabel 2 : Masa Kerajaan di Kabupaten Sumenep .....	hal 39
✓ Tabel 3: Jumlah pesantren di Kabupaten Sumenep.....	hal 46
✓ Tabel 4: Calon kepala daerah dalam pemilukada Kab. Sumenep.....	hal 90
✓ Tabel5: Latar belakan calon kepala daerah dalam pemilukada.....	hal 91
✓ Tabel 6: Perolehan suara pemilukada Kab. Sumenep putaran I.....	hal 92
✓ Tabel 7: Perolehan suara pemilukada Kab. Sumenep putaran II.....	hal 92

## DAFTAR GAMBAR

- ✓ Gambar 1: Peta Kabupaten Sumenep ..... hlm. 29



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	01
B. Rumusan Masalah .....	06
C. Tujuan Penelitian .....	06
D. Manfaat Penelitian .....	07
E. Tinjauan Pustaka .....	07
F. Landasan Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Metode Pengambilan Data .....	23
3. Analisis Data .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	26

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

A. Kondisi Geografis .....	27
B. Kondisi Demografis .....	29
C. Sejarah Perjuangan Rakyat Sumenep .....	31
D. Kepemimpinan dalam Masyarakat Sumenep .....	32
d. 1. Sumenep Masa Aria Wiraraja .....	38
d. 2. Realitas Sosial Keagamaan .....	43

## **BAB III**

### **IDENTITAS DAN DINAMIKA POLITIK NU DALAM PANGGUNG POLITIK NASIONAL**

A. Sejarah Kelahiran NU .....	46
B. Paham Keagamaan NU .....	49
C. Bentuk dan Sistem Keorganisasian NU .....	52
c. 1. Bentuk dan Tujuan Organisasi NU .....	52
c. 2. Sistem Keorganisasian NU .....	55
D. Akar Historitas Keterlibatan NU dalam Politik .....	60
d. 1. Perjuangan Melawan Penjajahan .....	60
d. 2. Resolusi Jihad .....	63
d. 3. Masa Politik Kekuasaan NU (1945-1984) .....	63
d. 4. Pembubaran PKI .....	65
d. 5. Penerimaan Asas Pancasila .....	65
d. 6. Masa Perubahan Arah Politik NU .....	66

## **BAB IV**

### **NU DAN POLITIK LOKAL KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2010**

A. Konstalasi Pemilukada .....	<b>69</b>
a.1. Visi dan Misi Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 .....	<b>79</b>
a.2. Hasil Suara Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2011.....	<b>89</b>
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Peran Elite NU dalam Pemilukada	<b>92</b>
C. Kiai dan Politik Lokal .....	<b>97</b>
D. NU dan Politik Lokal .....	<b>106</b>
E. Peran Politik Elite NU dalam PEMILUKADA .....	<b>109</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	<b>124</b>
B. Saran-saran .....	<b>127</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>129</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

NU (*Nahdlatul Ulama*) berperan penting dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ranah politik, NU pernah menjadi sebuah partai besar yang disegani. Akhirnya ia memilih keluar dari lingkaran percaturan politik praktis melalui khittah NU 1926 yang diputuskan melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 13-16 Rabi'ul Awwal 1404 H/18-21 Desember 1983 M.

Sejak saat itu NU dan politik terpisah secara praktis. Namun demikian tidak dengan serta merta melepas para kader-kadernya untuk tidak terjun di panggung politik. Saat ini telah banyak kader NU menduduki posisi penting baik di pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari *background* rumah asal mereka sebagai golongan *nahdliyin*.

Begitupula yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep. Sejak pemilihan umum secara langsung tidak sedikit kader NU duduk di pemerintahan lokal sebagai DPRD ataupun kepala pemerintahan daerah (bupati). Yang menjadi persoalan utama disini ialah tidak hanya mereka yang menang merebut kuasa, namun lebih pada bagaimana pengaruh elit lokal NU dalam dinamika Pemilukada di Kabupaten Sumenep terutama pada tahun 2010.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Sedangkan lokasi penelitian ialah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sasaran penelitian masyarakat Sumenep dan elit NU Kabupaten Sumenep. Waktu penelitian berlangsung selama satu bulan penelitian termasuk *preliminary research*.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa rangkaian kesinambungan antara elit NU yang berkiprah di panggung politik praktis dan mereka yang berada di belakang panggung. Selain itu pertarungan beberapa calon kepala pemerintahan yang nota bene adalah rata-rata sebagai warga *nahdliyin* tidak menjadikan pengaruh atau restu kiai sebagai alasan utama pemilih pada pemilukada tahun 2010 memilih calon yang dikehendaki.

**Keywords: NU, Pemilukada, Pengaruh, Kiai, Sumenep**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nahdhatul Ulama<sup>1</sup> didirikan di Surabaya pada tahun 1926 dengan Khittah 1926 sebagai pijakan gerakannya. Memiliki jaringan struktur kelembagaan organisasi mulai dari pusat sampai desa. Pada awal berdirinya NU adalah organisasi sosial keagamaan bukan partai atau organisasi politik. Walaupun bukan partai politik, NU dan politik sulit dipisahkan, karena dari kelahirannya saja NU muncul sebagai bagian dari dinamika politik nasional dan internasional kala itu (1926). Yaitu sebagai gerakan penggalangan nasionalisme di tengah iklim kolonial.

Namun demikian, NU sejak kelahirannya tidak memosisikan diri sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi sosial keagamaan. NU lebih menjadi kekuatan politik kebangsaan daripada politik praktis.<sup>2</sup> Walaupun dalam perjalanannya NU sempat juga menjadi Partai Politik yakni pada tahun 1952 setelah menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU. Dan sempat juga bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 akibat kebijakan pemerintahan orde baru yang menyatukan partai-partai Islam dalam satu partai, yakni PPP. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama sampai pada muktamar ke- 27 tahun 1984 di Situbondo yang salah satu keputusannya adalah mengembalikan NU

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya disingkat menjadi NU seperti sebutan yang populer dalam masyarakat.

<sup>2</sup> Lihat KOMPAS edisi Jumat, 19 Maret 2010.

kepada khittah 1926 yang berarti menarik NU dari segala bentuk kegiatan politik praktis.

Di samping faktor itu ada alasan lain yang menyebabkan NU sangat dekat dengan politik, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut 45 juta jiwa.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dari segi jumlah penduduknya (87 % dari 250 juta penduduk).<sup>4</sup> Tidak heran, dengan jumlah pengikut sebanyak itu di setiap menjelang pemilu, NU bagai madu di taman yang siap dihisap oleh para kumbang. NU seperti rumah besar yang menyediakan banyak madu. Kunjungan Capres dan Cawapres tidak sekadar silaturahmi, tetapi sekaligus ajang “tawar menawar” politik, baik untuk jabatan menteri, dirjen, irjen, maupun yang lainnya. Terlebih lagi warga NU itu dikenal ramah, terbuka, toleran, mudah memaafkan, dan mudah diarahkan oleh tokoh lokal.<sup>5</sup>

Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, tepatnya di Jawa Timur, pengurus wilayah NU Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan berupa edaran ke seluruh cabang-cabang di seluruh wilayah tersebut untuk mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres yaitu Jusuf Kalla dan Wiranto. Dalam hal ini, NU sudah terlibat dalam politik praktis yang tentunya bertolak belakang dengan semangat khittah NU 1926 yang menyatakan NU

---

<sup>3</sup> Lihat KOMPAS edisi Jumat, 16 April 2010.

<sup>4</sup> Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. xi.

<sup>5</sup> Ahmad Nurhasim dan Nur Kholik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm. xi.

sebagai jamiyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.<sup>6</sup>

Fenomena dukung-mendukung salah satu calon bukan hanya pada pemilu presiden dan legislatif tapi juga pada Pemilukada baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, seperti halnya di salah satu kabupaten paling ujung timur di pulau Madura yaitu Sumenep yang penduduknya berjumlah 1.136.000 jiwa.<sup>7</sup>

Dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan NU menjadi organisasi Islam terbesar di kabupaten Sumenep. Ini terlihat dari tradisi-tradisi keagamaan yang ada di sana dan adanya struktur kepengurusan NU mulai dari tingkat cabang (kabupaten) sampai dengan tingkat ranting (desa). Keberadaan NU menjadi “taman yang banyak madunya” bagi para calon bupati. Ini bisa dibuktikan dengan terpilihnya KH. Ramdan Siradj yang nota bene dari kalangan *nahdhiyyin* sebagai Bupati Sumenep dua periode berturut-turut mulai 2000-2005 sampai 2005-2010.<sup>8</sup> Begitu juga dengan perolehan kursi legislatif, partai-partai yang punya hubungan historis dan kultural dengan NU mendominasi perolehan kursi, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PPP. Keduanya mendominasi kursi di parlemen pada tiga kali kontestasi Pemilu setelah tumbang rezim Orde Baru (Pemilu

---

<sup>6</sup> Teks khittah NU hasil muktamar NU ke- 27 di Situbondo, coba lihat selengkapnya dalam Ahmad Nurhasim, dan Nur Kholik Ridwan. *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*. (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hal. 175.

<sup>7</sup> [http://www.sumenep.go.id/berita\\_c.php?pid=11234](http://www.sumenep.go.id/berita_c.php?pid=11234), diakses pada 20 Maret 2011, jam 20:03.

<sup>8</sup> Nahdliyin adalah penyebutan untuk warga NU, lihat Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 1999).

1999,2004 dan 2009).<sup>9</sup> Fakta tersebut membuktikan kuatnya pengaruh NU dalam percaturan perpolitikan di Sumenep baik dalam perebutan kursi DPRD maupun dalam momentum Pemilukada.

Kuatnya pengaruh NU tidak bisa dilepaskan dari peran para elitnya, yaitu kiai.<sup>10</sup> Kiai dalam masyarakat Madura sangat vital perannya dalam pelbagai sendi kehidupan. Ini bisa dilihat dari ajaran yang selama ini dipegang teguh orang Madura, yang berbunyi *bhuppa'*, *bhabbhu*, *ghuru*, *rato* (bapak, ibu, guru/kiai, dan raja/pemerintah) . Dalam ajaran tersebut ketaatan ada klasifikasinya. Ketaatan kepada orang tua (bapak/ibu) menjadi ketaatan yang paling tinggi yang harus dijunjung. Disusul ketaatan kepada kiai baru kemudian kepada pemerintah. Posisi kiai mendapat posisi yang terhormat lebih tinggi derajatnya dari pemerintah.

Kiai selalu menjadi rujukan masyarakat Madura dalam pengambilan keputusan terkait dengan hidupnya. Tidak hanya pada wilayah sosial keagamaan saja akan tetapi juga persoalan-persoalan yang sebenarnya “bukan” keahliannya seperti persoalan-persoalan ekonomi dan politik.<sup>11</sup> Posisi istimewa ini didapat berkat “kharisma” yang melekat pada sosok kiai. Kiai

---

<sup>9</sup> Pada Pemilu 1999 PKB mendapat 25 kursi, Sementara PPP mendapat 4 kursi. Pemilu 2004 PKB 20 kursi. PPP mendapat 7 kursi. Dan pada Pemilu 2009 PKB 11 kursi, PPP 7 kursi dan Partai baru yang juga punya hubungan kultur dengan NU yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mendapat 4 kursi dari total 50 kursi yang diperebutkan. Untuk lebih jelasnya lihat [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/2\)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/2)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf), diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 45.

<sup>10</sup> Kiai merupakan sebutan untuk para Pengasuh Pesantren di Madura, lihat Ahmad Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004), 39-73.

<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya baca skripsi Ahmad Chufron Sirodj yang berjudul *Peran dan Posisi Kiai di Tengah Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama 2008).

dianggap mempunyai kekuatan supra natural yang tidak dimiliki sembarang orang.<sup>12</sup>

Kharisma itu didapatkan berkat dua dimensi yang dimilikinya. *Pertama*, kharisma yang diperoleh secara *given* seperti, adanya ikatan genealogis dengan kiai kharismatik sebelumnya, tubuh yang besar serta suara yang keras. Kedua, melalui proses *perekayasaan*. Dalam arti melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang shaleh, dan kesetiaan untuk berbagi kepada sesama.<sup>13</sup>

Melalui kharisma yang melekat padanya, kiai menjadi imam tidak hanya pada urusan-urusan *ubudiyah* tetapi juga pada urusan-urusan politik. Sangat gampang ditemui menjelang even-even politik seperti pemilihan legislatif dan Pemilu, banyak calon memerlukan *sowan*, dan memohon restu politik kepada para kiai yang dianggap mempunyai kharisma untuk melegitimasi dia sebagai calon yang pantas untuk dipilih.

Dari kharisma kiai inilah, NU dengan mudah memobilisasi massa untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Ini menjadi semacam *social capital* dalam memperkuat pengaruh dan otoritasnya di tengah masyarakat. Jadi tidak heran kalau KH. Ramdan Siraj dengan “mudah” mengais suara pada dua kali kontestasi PEMILUKADA yang dimenangnya.

---

<sup>12</sup> Max Weber, *Sosiologi*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2006), hlm. 292-301.

<sup>13</sup> Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004), hlm. 87-97.

Bahkan pada Pemilu pada Juni 2010 lalu. Dari sekian calon bupati dan wakil bupati yang bersaing pada akhirnya kemenangan diperoleh oleh politisi sekaligus kiai, yakni K.H. Abuya Busyro Karim, M.Si berpasangan dengan Ir. Sungkono Sidik. Banyaknya calon bupati dan wakilnya yang berasal “dari” NU menandai persaingan yang kuat untuk berebut kantong suara yang berasal dari kaum *nahdiyyin*. Setidaknya lima pasangan dari delapan calon bupati dan wakilnya pada 2010 lalu merupakan kader-kader NU. Ini bisa dilihat dari jejak rekam karier masing-masing calon yang pernah ataupun yang masih aktif dalam kepengurusan NU seperti salah satu calon Bupati yang berangkat dari jalur independen yakni KH. Ilyasi Siraj yang pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Cabang NU (PCNU) Sumenep periode 2000- 2005.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, setidaknya penulis dapat merumuskan masalah untuk penelitian lebih lanjut. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah pengaruh elit lokal NU dalam dinamika Pemilu di Kabupaten Sumenep tahun 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam tentang fenomena sosial politik yang muncul berkaitan dengan otoritas keagamaan. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan proses Pemilu di Kabupaten Sumenep tahun

---

<sup>14</sup>Untuk profil lengkap pasangan calon Bupati dan wakilnya lihat <http://www.smpn1.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xMTE5NA%3D%3D>, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 21.

2010, yang secara tidak langsung melibatkan NU sebagai organisasi keagamaan dalam prosesnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan:

- Menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran bagi warga Sumenep dalam pemahaman mengenai Pemilukada.
- Secara praktis akan bermanfaat sebagai masukan agar dapat digunakan untuk pertimbangan oleh para pakar, dan para elite politik lokal dalam mengambil kebijakan.
- Untuk dimanfaatkan dalam kajian-kajian yang lebih spesifik dan belum terungkap dalam penelitian serupa.
- Secara teoritis dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian pengetahuan khususnya Sosiologi (Politik).

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sudah banyak kajian ataupun penelitian yang kita temui berkaitan dengan NU dalam hubungannya dengan sosial budaya, keagamaan ataupun dengan politik baik yang berupa buku, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan Andree Feillard bahwa penelitian mengenai NU mulai dilakukan secara sungguh-sungguh sejak tahun 1971 dengan penelitian Kenward, lalu Misuo Nakamura (1981 dan seterusnya),



Sydney Jones (1984), Martin van Bruinessen (1994), dan terakhir Greg Fealy.<sup>15</sup>

Penelitian mengenai NU yang paling dekat dengan persoalan politik misalnya penelitian yang ditulis oleh Andree Feillard yang berjudul “NU vis a vis Negara.” Buku ini menganalisis interaksi umat Islam khususnya NU dengan negara mulai dari masa kolonial sampai dengan tumbangnya rezim orde baru, rivalitas elite abangan terhadap santri, dan hubungan NU dengan wacana-wacana kebangsaan pada waktu itu.<sup>16</sup> Sebagaimana menjadi titik tekanan dalam penelitiannya adalah berusaha memperjelas alasan-alasan yang menyebabkan perubahan arah politik bersejarah tahun 1984 dan mengukur dampaknya pada tahun-tahun berikutnya.

Bagi mereka yang memahami politik keagamaan seputar rivalitas elit abangan terhadap santri atau dalam bahasanya Andree politik keagamaan konvensional buku tersebut secara tidak langsung memberikan argumen pandangan yang kuat dengan menunjukkan sikap tanggap semua pelaku drama sosial tersebut, terhadap peristiwa baru yang kadang-kadang tidak terantisipasi. Selain itu Andree dalam bukunya tersebut secara tidak langsung membongkar sejumlah stereotipe Islam tradisional, dengan menunjukkan komitmen yang mendalam kelompok Islam tradisional terhadap nilai-nilai kebangsaan, keterbukaan mereka terhadap pembaruan sosial dan pendidikan,

---

<sup>15</sup> Andree Feillard, *NU vis-a-vis NEGARA; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS), hlm. Xii.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 196-197.

serta mendalamnya dialog dengan kebudayaan lokal, setidaknya di Jawa sebagai objek penelitiannya.

Secara umum penelitian Andree tersebut menganalisis perubahan NU dari masa ke masa sesuai dengan sepak terjangnya yang bersinggungan dengan dunia politik praksis. Misalnya ia melacak perkembangan NU sejak awal berdirinya tahun 1926 hingga tahun 1965. sebagai mantan jurnalis yang tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun secara tidak langsung ia begitu memahami pola sosial masyarakat Indonesia secara umum.

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian Andree ialah penelitian yang ditulis oleh Greg Fealy yang berjudul “Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967.” Buku yang diterbitkan oleh LkiS Yogyakarta pada tahun 2003 itu berisi analisis tentang sejarah politik NU selama lima belas tahun mulai tahun 1952 sampai dengan 1967. Mengenai peran dan prestasi NU dalam rentang waktu dimana terjadi yang namanya pemberontakan daerah dan peralihan dari sistem Parlementer ke sistem Demokrasi Terpimpin. Kemerosotan ekonomi, dan meningkatnya konflik sosial menghantarkan pada percobaan kudeta pada 1965, yang diikuti dengan pembantaian dan penahanan massal, yang berujung pada pencopotan Soekarno dari jabatan presiden yang kemudian digantikan oleh rezim baru Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Greg Fealy dalam penelitiannya tersebut secara kasat mata hendak menunjukkan suatu kelebihan NU pada para pembacanya. Secara sederhana ia berkesimpulan bahwa NU tidaklah seperti pandangan orang kebanyakan

yang cenderung negatif. Seakan-akan ia hendak menepis tanggapan miring bahwa NU oportunistis dan tidak berprinsip. Karena sikap NU, seperti dalam temuannya di lapangan, selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang sudah lama dianutnya, yaitu menyandarkan diri pada fiqh Sunni klasik. NU secara kultural meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (*jamiyyah*). Oleh karena itu tidak jarang para elit NU selalu bersikap hati-hati, luwes, dan memilih jalan tengah (moderat) dalam mengambil sikap apapun termasuk jalan politik praktis. Sebab dalam *qonun* (undang-undang) NU yang dirumuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari selalu mengacu pada pencapaian kemaslahatan (*maslahat*) dan menjauhi segala kerugian dan kerusakan (*mafsadah*).

*Ketiga*, buku yang berjudul “Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik,” yang ditulis oleh M. Ali Haidar pada 1998. Buku terbitan Gramedia ini menjelaskan latar belakang pergulatan NU dalam pentas politik nasional. Dengan latar belakang dan visi keulamaannya, NU menyikapi masalah yang dihadapi juga menggunakan idiom-idiom keagamaan, khususnya kaidah-kaidah fikih yang memberi kelenturan interpretasi. Oleh karena itu kadang-kadang sikap NU dan ulamannya bagi sebagian orang sering tidak terduga bahkan dianggap ambivalen dan oportunistis.

Melalui pendekatan ushul fiqh Haidar menjelaskan tentang pola hubungan NU dengan segala problem kebangsaan. Ia mencoba

mengungkapkan dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam NU dan bagaimana refleksinya dengan tradisi pemikiran fikih. Sebab sudah menjadi rahasia umum di kalangan nahdliyin bahwa NU tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fikih baik kerangka teoritis (*ushul al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*). Analisis dengan kerangka pemikiran tersebut ia hendak memahami sejauh mana rekonstruksi pola perubahan dan dinamika NU menghadapi tantangan problematik sosio-kultural dan politik kebangsaan.

Dalam melihat realitas sosio politik dan sepak terjang kaum elite NU, Haidar memberi garis besar dengan konteks kaidah-kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*). Misalnya kaidah *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* yang mempunyai makna kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya (bagian-bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan). *Kedua*, ialah *dar al-mafasid muqaddam ala jalbal masalih*, artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar. *Ketiga*, ialah memilih bahaya yang paling ringan akibatnya menurut kaidah *iza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuha dararan bi irtika bi akhaffihima*. Artinya apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah kedua mendahulukan upaya preventif menghindari bahaya daripada melaksanakan kemaslahatan yang beresiko lebih tinggi. Dan kaidah umum yang sering

dipakai oleh NU sebagai pembenaran terhadap tindakannya ialah *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman*, yaitu hukum tergantung kepada *illat-nya*.<sup>17</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Abdul Waris yang berjudul Peran Politik Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Jember Tahun 2005. Skripsi tersebut membahas tentang fenomena politik ulama (kiai) di Kabupaten Jember tahun 2005. Masyarakat Jember yang bercorak relejius, kehidupan yang homogen-desa-haus akan petuah dan nasehat dari ulama. Terutama dari ulama berkharisma. Kharisma yang dimiliki ulama inilah yang dijadikan sebagai jembatan untuk dapat menggandeng masyarakat untuk menggandengnya. Antusiasme ulama dalam menjunjung tinggi demokrasi dimanifestasikan dalam arena politik lokal seperti pemilihan kepala daerah pada tahun 2005. Seiring dengan itu semua, tentunya juga mempunyai tujuan yang mulia yakni ingin memajukan Jember sebagai kabupaten yang maju dan makmur. Kharisma ulama sering dijadikan jembatan oleh elit-elit lokal untuk menuai hasil suara yang akan dicapai dalam Pemilu.

*Kelima*, buku Abdur Rozaki yang berjudul "Menabur Kharisma Menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura." Buku yang diterbitkan oleh Pustaka Marwa Yogyakarta pada tahun 2004 tersebut mengangkat fenomena relasi kuasa antara kiai di satu sisi dengan

---

<sup>17</sup> M. Ali Haidar, *Nadatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramadia, 1998). Hlm: 319-323.

blater di sisi yang lain.<sup>18</sup> Dimana keduanya berbagi peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Madura yang terkenal agamis.

*Disebabkan antar keduanya (kiai dan blater) sama-sama memiliki motifasi membangun kekuatan kultural dan ekonomi politik di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, bangunan relasi keduanya saling bersimbiosis untuk sedapat mungkin saling mengakomodasi, memelihara harmoni, sekalipun disertai pula dengan kompetisi bahkan konflik kepentingan sebagaimana layaknya logika kekuasaan yang penuh dengan intrik dan persaingan untuk saling menjatuhkan lawan.<sup>19</sup>*

Mengamati beberapa kasus relasi kekuasaan kiai dengan blater dalam buku karya Rozaki tersebut ditemukan beberapa point bahwa keduanya antara kiai sebagai posisi tokoh kultural-spiritual dan blater sebagai kultural memegang peran penting dalam hubungan relasi kemanusiaan di Madura. Seperti diungkapkan oleh Rozaki bahwa relasi kekuasaan kiai dengan blater berlangsung dengan rumit dan kompleks.

Dalam penelitian ini ialah hendak mengungkap keterlibatan elit politik lokal di Kabupaten Sumenep pada Pemilu tahun 2010 lalu. Dari berbagai referensi yang disebutkan di atas fokus pembahasan skripsi ini adalah pada peran elite NU dalam perpolitikan lokal di kabupaten Sumenep, serta faktor-faktor kharisma yang selama ini menjadi social capital bagi NU dalam menjangkau suara bagi pasangan tertentu. Serta berupaya 'menguliti' sejauh mana kharisma NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di kabupaten Sumenep di tengah arus oportunistik dan pragmatisme dalam perpolitikan nasional.

---

<sup>18</sup> Blater adalah sebutan untuk para jagoan di Madura, seperti yang diungkapkan Abdur Rozaki dalam bukunya *Menabur Kharisma Menuai Kharisma Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm.57-58.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm.172

## F. Landasan Teoritik

Untuk menganalisis posisi dan peran elite NU dalam perpolitikan di kabupaten Sumenep, bisa ditinjau lewat teori fungsionalisme strukturalnya Robert K Merton. Merton membahas hubungan antara kultur, srtuktur, dan anomie. Kultur adalah sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok.<sup>20</sup> Dalam NU dikenal yang namanya khittah 1926 yang mengatur semua tindak tanduk NU dalam berbagai aktivitas, sosial, politik, agama, ekonomi dan budaya. Dan itu sifatnya mengikat.

Adapun stuktur adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya.<sup>21</sup> NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia khususnya di Sumenep mempunyai stuktur kepengurusan yang lengkap dari cabang sampai ranting.

Sementara anomie adalah adanya keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural.<sup>22</sup> NU mempunyai khittah 1926 sebagai nilai “kultur” yang menjadi landasan gerakannya. Dalam ranah politik, NU harus bersikap pasif, tidak boleh aktif dalam politik praktis karena NU bukan bagian dari partai maupun organisasi politik seperti yang telah disinggung di atas. Akan tetapi kemudian nilai-nilai

---

<sup>20</sup> George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 142.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 142.



khittah 1926 tidak menjadi penting dalam prakteknya di lapangan bahkan dikesampingkan setidaknya melihat fakta-fakta yang disajikan pada latar belakang skripsi ini. Dimana NU begitu dekat bahkan terlibat aktif dalam kisaran politik praktis. Ini kemudian yang disebut anomie dalam konsepnya Merton.

Seperti yang telah disinggung di atas ketika kita akan meneliti masalah NU tidak bisa dilepaskan dari kharisma yang melekat pada elite-elitenya yaitu kiai. Kiai mempunyai otoritas yang kuat dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat agamis di Madura khususnya di kabupaten Sumenep. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kharisma yang melekat pada dirinya.

Berbicara tentang pengertian kharisma sangatlah penting terutama erat kaitannya dengan pendekatan sosiologi agama. Konsep Max Weber tentang kharisma dipungutnya dari bahasa Yunani, diterjemahkan dalam beberapa tulisan Kristen dengan "rahmat" (*grance*).<sup>23</sup> Tetapi Weber menggunakannya dengan pengertian yang lebih luas dalam sosiologinya sebagai bagian dari klasifikasinya tentang berbagai tipe otoritas. Dalam kasus yang bertipe kharismatik, kepatuhan diberikan kepada pemimpin (kiai) yang diakui karena sifat-sifat keteladanan pribadi yang dimilikinya.

Kharisma, di batasi oleh Max weber sebagai suatu yang tertentu dalam kepribadian seseorang dan menjadikan dibedakan dari orang biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang dianugrahi dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar biasa atau sekurang-kurangnya merupakan

---

<sup>23</sup> Betty R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 208.

pengecualian dalam hal-hal tertentu. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai teladan atas dasar itu individu diperlakukan sebagai pemimpin yang kharismatik. Ia juga menyatakan bahwa pemimpin kharismatik sebagai pemimpin yang dihormati dan dipatuhi karena memiliki sifat-sifat personal yang luar biasa. Otoritas yang dimiliki oleh pemimpin ini tergantung pada kepercayaan dari pengikutnya tersebut.<sup>24</sup>

Dalam melihat hubungannya dengan kepemimpinan dan juga kekuasaan maka *authority* dapat dijadikan sebagai pisau analisis. Max Weber membagi otoritas dalam tiga jenis; *pertama, Rasional-Legal Authority*. Konsep tersebut adalah bentuk hirarki wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern, hal ini terdapat dalam organisasi-organisasi modern yang berdasarkan pada konstitusi secara resmi.

Adanya kekuasaan dan kekuatan yang berpangku pada satu individu mengisyaratkan sebuah otoritas penuh terhadap segala hal, terutama menyangkut perintah struktural. Dalam kasus ini terlihat misalnya antara bos di suatu perusahaan dengan karyawannya. Dalam beberapa hal barangkali keduanya mempunyai perbedaan dan hak asasi manusia. Namun pada realitasnya acapkali bawahan cenderung *introvert* di depan tuan mereka. Alasannya tidak lain adalah segan, takut diturunkan gajinya, dan bahkan takut terhadap pemecatan yang berkonsekuensi sistemik pada hubungan yang lain (dalam hal ini keluarga).

---

<sup>24</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 229.

*Kedua, Traditional Authority.* Otoritas tradisional ialah mengacu pada wewenang seseorang dengan mengambil keabsahan atas tradisi yang dianggap suci dan sakral, dan ini terbagi dalam dua jenis: a. Gerontokrasi, yaitu jenis otoritas yang ada di tangan-tangan orang tua dalam suatu kelompok. b. Patriarkalisme, yaitu jenis wewenang dimana kekuasaan di dasarkan atas otoritas warisan. c. Patrimonialisme, yaitu mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang terdekatnya yang memiliki legalitas pribadi kepadanya. Ciri dan wewenang jenis ini adanya sistem norma yang dianggap keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

Secara garis besar konsep *traditional authority* tersebut mengacu pada pengaruh atau kekuatan pribadi-individu di dalam hubungan interaksi sosial mereka. Sejauh mana ia diakui oleh masyarakat di lingkungannya sejauh itu pula ia mempunyai kekuatan atau pengaruh.

Biasanya konsep tersebut mengacu pada orang atau oknum yang terlebih dahulu mempunyai kuasa hasil keturunan. Misalnya anak raja, ketika sudah dewasa akan ditahbiskan menjadi seorang raja. Walaupun terdapat orang-orang paling pintar dan segalanya diluar lingkaran kerajaan. Disinilah sistem patriarkhi mengacu dan menyebarkan pengaruhnya.

Pada beberapa daerah konsep tersebut jarang dijumpai. Biasanya konsep yang demikian dapat ditemui di beberapa wilayah yang masyarakatnya masih menganut sistem patriarkal.

*Ketiga, Charismatic Authority.* yaitu wewenang karena kualitas yang luar biasa yang dimilikinya, penguasaan atas orang-orang secara predominan internal, dimana si tertakluk menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan pada kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut.

Konsep yang ketiga tersebut cenderung logis dan mudah diterima di tengah-tengah masyarakat modern seperti saat ini. Ia mengandalkan kemampuan individu dalam merebut pengaruh terhadap orang lain.

Dalam konteks pemenangan pemilu, konsep *charismatic authority* dapat dijadikan ukuran seseorang seberapa besar berpengaruh di dalam hubungan interaksi sosialnya. Adanya masyarakat yang berpikir logis secara tidak langsung juga akan memilih sesuatu yang dianggapnya logis atau masuk akal.

Secara definitif kharismatik bisa tampil sebagai tipe murni yang hanya bersifat sementara, selama kurun waktu tertentu ketika pemimpin itu tampil dan mengumpulkan pengikut-pengikut setianya. Namun bila kelompok itu terus menerus, menurut Weber, akan muncul kepercayaan dikalangan para anggotanya terhadap adanya kharisma warisan atau kharisma jabatan.

Sementara Kontuwijoyo melihat hubungan masyarakat Madura dengan kiai dalam konteks ekologis masyarakat Madura. Menurutnya kebanyakan desa di Madura mempunyai pola desa tersebar (*scattered village*), dimana perumahan penduduk terpecah dalam kelompok-kelompok kecil lima atau enam keluarga yang dikelilingi oleh tegal. Kondisi demikian tentu

menambah sulitnya masyarakat desa untuk menjadi satuan teritorial dan sosial.<sup>25</sup>

Dalam konteks sosial seperti inilah, agama dan kiai di Madura menjadi “organizing principle”. Agama (NU pen) memberikan “*collective sentiment*” melalui upacara-upacara ibadah dan ritual serta sistem simbol yang satu. Seperti dalam pelaksanaan sholat jumat, dalam ketentuan syariah tidaklah sah sembahyang Jumat bila tidak dihadiri 40 orang jamaah. Nilai keagamaan ini tentunya memaksa orang Madura untuk membangun masjid desa. Keharusan agamalah yang membuat orang Madura menjadi sebuah masyarakat dengan membentuk organisasi sosial yang didasarkan pada agama dan otoritas kiai.<sup>26</sup>

NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di kabupaten Sumenep selalu akan bersinggungan dengan kekuasaan karena faktor-faktor seperti yang telah disinggung di atas. Dan kekuasaan yang terbangun berdasarkan otoritas keagamaan selalu melibatkan keterkaitan atau ruang yang bersifat sakral dan yang profan.<sup>27</sup>

Eksistensi kekuasaan bagaimana diperoleh, diakui, dipelihara, dan dipertahankan sangat terkait pula dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut digelar atau dioperasikan oleh individu atau kelompok di dalam masyarakat.

Dalam pendekatan Gramsci meliputi dua cara. Pertama, dengan praktek dominasi atau penindasan. Kedua, dengan praktek hegemoni.

---

<sup>25</sup> Kutowijo, *Memahami Madura; Sebuah Pendekatan Sosial Historis, Ekologi, dan Kependudukan*, dimuat dalam Radikalisasi Petani, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 87

<sup>26</sup> Seperti yang dikutip oleh Abdur Rozaki dalam *Menabur Kharisma Menuai Kharisma Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004),

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm: 21.

Dalam praktek yang pertama, suatu individu atau kelompok sosial di dalam masyarakat yang dapat menguasai atau memiliki akses terhadap instrumentasi kekerasan, maka ia akan dengan mudah memperoleh kekuasaan sosial. Sedangkan dalam praktek hegemoni, kekuasaan diperoleh dan dioperasikan melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Kiai sebagai elit dari NU dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dalam hal ilmu-ilmu keagamaan, dapat membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori moral dan immoral dalam masyarakat, terutama menyangkut wilayah keberagamaan.

Kepandaian dalam ilmu pengetahuan agama yang dimiliki kiai, melalui praktek pengajaran pendidikan dan dakwah keagamaan dapat membentuk struktur kognitif dan afektif individu dan kelompok-kelompok sosial dengan orientasi dan visi keberagamaan yang dikonstruksi oleh sang kiai. Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dengan jalan “konsensus” bukan melalui praktek kekerasan. Konsensus mengenai moralitas sosial dengan mudah dibangun di dalam masyarakat, karena pengetahuan tentang moralitas keberagamaan masyarakat dikonstruksikan oleh sang kiai sebagai elite agama (NU), sebagai pemimpin moral masyarakat. Dan kekuasaan yang dimiliki kiai dalam wilayah keberagamaan akan berimpas terhadap wilayah sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Dalam kacamata konflik, konsensus dapat menjadi alat utama meredakan kepentingan antara dua kelompok bertikai. Ia dapat memberikan kontribusi positif bagi integrasi dan perubahan dalam struktur masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh George Ritzer (2004) bahwa Ralf Dahrendorf (1956, 1968) sebagai pencetus teori konflik dan konsensus memberikan pemahaman bahwa tatanan apapun yang ada di tengah-tengah struktur masyarakat tumbuh dan berkembang dari beberapa tekanan yang sengaja dilancarkan oleh beberapa orang atau oknum yang memiliki kuasa. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa ada konflik dan konsensus, yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. Adanya konflik terjadi karena adanya konsensus yang dibangun sebelumnya. Begitupula sebaliknya.<sup>28</sup>

Kalau Dahrendorf berpandangan bahwa realitas sosial selalu tidak lepas dari konflik dan cenderung berpandangan bahwa otoritas mempunyai peran dalam pembuatan konflik. Secara tidak langsung pandangan Dahrendorf cenderung negatif dalam mengartikulasikan konsensus sebagai jalan utama menuju konflik. Hal tersebut dibantah dengan teori konflik yang dirumuskan oleh Lewis A. Coser (1968) bahwa adanya konflik dalam interaksi sosial tidak akan lepas dari katup penyalut (*safety valve*). Coser berpendapat bahwa konflik justru memiliki “fungsionalitas” positif dalam masyarakat. Hal ini dia curahkan dalam bukunya yang berjudul: “The Functions of Social Conflict.”

*Teori ini menekankan proses-proses sosial yang didasarkan pada konsensus nilai dan memandang masyarakat dari sisi solidaritas, integrasi, dan keseimbangan. Namun, para Sosiolog menganggap teori ini sebagai salah satu teori yang menutup mata terhadap konflik yang selalu melekat dalam setiap masyarakat. Dalam hal ini, teori*

---

<sup>28</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009, hlm.282



*fungsiional struktural tidak melihat realitas bahwa masyarakat sesungguhnya dipenuhi oleh berbagai ketegangan dan selalu berpotensi untuk melakukan konflik. Teori fungsiional cenderung melihat masyarakat berada dalam suatu posisi yang aman, damai, tentram, bersatu tanpa adanya konflik di antara mereka.*<sup>29</sup>

Dalam masyarakat kultural adanya konflik tentunya dapat teratasi dengan pengaruh kuat (*otoritas*) seseorang yang mempunyai pengaruh. Dapat disimpulkan sementara bahwa kharisma dapat menjadi semacam konsensus positif apabila ia dilaksanakan dengan sebaik-baik cara. Sehingga masyarakat yang mengikuti atau orang awam dapat memahami sejauh mana keberlangsungan pengaruh dari seseorang ataupun oknum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara yang teratur serta sistematis untuk melaksanakan sesuatu. Terutama dalam sebuah karya ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapat hasil yang optimal dengan data-data yang akurat.<sup>30</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif diskriptif, yang memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Yang berarti bahwa para peneliti kualitatif harus mempelajari

---

<sup>29</sup> Blasius Baene, "Telaah Tentang Fungsiionalitas Konflik Dalam Masyarakat Menurut Lewis A. Coser", <http://sapereaudenias.blogspot.com/2008/08/telaah-tentang-fungsiionalitas-konflik.html>. Minggu, 17 Agustus 2008

<sup>30</sup> Syaefuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1999), hlm. 91.

benda-benda di dalam konteks alaminya, berupaya untuk memahami, atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya.<sup>31</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang studi kasus Pemilukada secara langsung di kabupaten Sumenep tahun 2010 yang melibatkan NU secara langsung maupun tidak dalam prosesnya. Dengan pendekatan sosiologi politik dan sosiologi agama sekaligus.

## 2. Metode Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Observasi

Observasi adalah teknik paling awal dan paling dasar dalam berbagai penelitian. Mortis (1973) memberikan definisi tentang observasi sebagai “aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya demi tujuan-tujuan ilmiah atau tujuan lain”.<sup>32</sup>

- Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan berhadapan muka untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang

---

<sup>31</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1-2.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 523-523.

responden.<sup>33</sup>Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (2009) adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*The Art of Asking and Listening*). Selain itu juga wawancara merupakan cara yang sangat mengena dalam penelitian lapangan karena peneliti memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>34</sup>Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan tidak terlalu terikat kepada pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat wawancara tengah berlangsung. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>35</sup>

Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara acak. Akan tetapi penyusun mempunyai kriteria sebagai sesuatu yang betul-betul memahami peran NU dalam kaitannya dengan perpolitikan di kabupaten Sumenep. Yakni, pengurus NU mulai dari tingkat cabang sampai dengan ranting, pengurus pesantren, pejabat pemerintah setempat dan masyarakat.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pendukung untuk melengkapi metode-metode sebelumnya. Dokumentasi hanya sebagai media penguat bagi metode-metode sebelumnya. Yaitu untuk mencari data

---

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Riset dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 129.

<sup>34</sup> Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedi, 1992), hlm. 70.

<sup>35</sup> Sukarmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipt, 1998), hlm. 146.

atau variable-variable berupa catatan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

### 3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan sebuah pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data meliputi tiga tahapan, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi data.

Tahap *pertama* adalah reduksi data, berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisaporis. Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan.

*Kedua*, penyajian data merupakan konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Hal ini meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, diskripsi singkat, dan diagram-diagram.

Tahap pengambilan kesimpulan/verifikasi data merupakan tahapan *ketiga* yang meliputi interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.<sup>37</sup> Ketika data informasi telah dirangkum, dikelompokkan, diseleksi, dan saling dihubungkan, baru kemudian dilakukan proses transformasi data.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>37</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Sumenep. Di dalamnya dijelaskan tentang kondisi geografis, demografis Kabupaten Sumenep, sejarah perjuangan rakyat Sumenep, kondisi sosial keagamaan, dan struktur kepemimpinan masyarakat Kabupaten Sumenep.

BAB III: Berisi tentang Identitas dan dinamika politik NU dalam panggung politik nasional. Di dalamnya dijelaskan mengenai sejarah kelahiran, paham keagamaan, bentuk sistem keorganisasian NU, dan akar historitas keterlibatan NU dalam politik.

BAB IV: Berisi tentang NU dan Pemilukada Kabupaten Sumenep tahun 2010.

BAB V: Merupakan bab penutup. Dalam bab penutup ini akan dikemukakan tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bagian akhir skripsi juga akan ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai analisa atas penelitian tentang Elite NU Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi pada Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010) ini memberikan sebuah jawaban kongkrit keterlibatan warga NU secara umum pada pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Sumenep pada 2010 lalu.

Tidak hanya elite pengurus NU yang berlaga dalam kontes pemilu di Kabupaten Sumenep, banyaknya masyarakat Sumenep yang rata-rata merupakan warga NU atau masyarakat yang berpaham NU secara tidak langsung memberikan gambaran umum bahwa kiprah politik NU tidak mengacu pada ketentuan dan penetapan kebijakan politik secara struktural, akan tetapi lebih pada ranah kultural. Misalnya banyaknya kiai yang nota bene merupakan pengurus NU atau berpaham *ahlussunnah waljama'ah* masih sangat kuat mengakar pada realitas politik masyarakat Sumenep, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung terlibat dalam politik praktis. PCNU Kabupaten Sumenep dan beberapa pengurus di daerah atau kecamatan walaupun secara struktural tidak terlibat namun banyak ditemukan mereka aktif di berbagai partai dengan bendera politik yang berbeda.

Salah satu hal yang menarik dalam penelitian ini didapatkan bahwa selain hal tersebut diatas, kiprah para kiai atau tokoh masyarakat yang

berpaham *ahlussunnah waljama'ah* walaupun mereka terjun dalam politik praktis tidak menjadikan mereka lupa akan halaman sendiri. Tali silaturahmi yang telah lama diajarkan dan menjadi budaya di golongan NU masih melekat diantara para pesaing. Adanya keterikatan secara emosional tersebut menjadikan warga masyarakat di Kabupaten Sumenep tidak mempunyai konflik horizontal pada saat Pemilu pada berlangsung dan dua kali putaran berlangsung dengan aman.

NU sebagai entitas organisasi sosial keagamaan secara struktural mengacu pada khittah NU 1926 tidak melibatkan diri pada proses pemilihan umum. Begitupula di di Kabupaten Sumenep. NU secara institusional tidak menentukan sikap berkubu pada golongan, partai, orang tertentu. Namun begitu banyaknya warga NU di Kabupaten Sumenep secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa NU secara kultural telah melekat pada praktik politik di segala lini dan partai.

Dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan bahwa peta politik yang dibangun oleh kalangan warga *nahdliyin* di kabupaten Sumenep, terutama pada pelaksanaan Pemilu pada 2010 kemarin ialah kesadaran masyarakat akan politik (lokal) semakin tinggi dengan terpilihnya KH. Abuya Busro Karim sebagai bupati menggantikan bupati terdahulu KH. Ramdhan Siradj. Karena seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertarungan politik tingkat elite di Kabupaten Sumenep rata-rata diisi oleh kalangan warga *nahdliyin*. Namun demikian terpilihnya KH. Abuya Busro Karim oleh pemilih di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dilihat dari



kharisma seorang kiai atau bagian dari kalangan kiai, terdapat kemampuan *leadership* yang dimiliki sehingga masyarakat mengetahui sukses beliau dalam memimpin pemerintahan daerah melalui kebijakan DPRD yang dipandang pro-rakyat. Seperti diketahui publik Sumenep bahwa beliau pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Sumenep yang cukup mengakomodir kepentingan rakyat.

Selain temuan tersebut ditemukan pula adanya pengaruh ketokohan/kebapaan (patrilineal) dalam menentukan sikap dan tindakan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana disebutkan di BAB IV bahwa pengaruh tersebut cerminan dari rata-rata masyarakat nahdliyin dan kiai atau tokoh masyarakat NU setempat. Bahwa pemilihan kepala daerah (terutama dilakukan di masyarakat desa) masih menunggu sinyal baik dari para sesepuh atau kiai bukanlah hal yang baru lagi dalam percaturan politik di Kabupaten Sumenep.

Temuan lain dalam praktik pemilukada di Kabupaten Sumenep ialah masyarakat Sumenep pada umumnya selain pengaruh modal sosial, modal ekonomi juga tidak bisa lepas terutama pada saat kampanye politik berlangsung. Saya tidak mengatakan bahwa ditemukan praktik politik uang (*money politics*) di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi dari penuturan Panjdi Taufik (ketua PC NU Kab. Sumenep) mengenai *tongket settong saeket* dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat yang sudah muak dengan janji-janji politik seorang calon dari masa ke masa saat pemilu membutuhkan kerja riil.

Istilah *tongket settong saeket* bermakna tongkat yang diikat menjadi satu. Istilah tersebut merupakan istilah lokal bagi keberlangsungan perpolitikan baik dari tingkat bawah (desa) hingga atas (kabupaten dan nasional). *Tongket settong saeket* mempunyai makna sosiologis sebagai hubungan emosional suatu struktur masyarakat selain dapat dibangun oleh pencitraan sosial yang baik, dapat pula dan sudah menjadi rahasia umum acap dibarengi dengan ‘ongkos’ politik yang diberikan ‘secara cuma-cuma’ kepada para pemilih atau pemilih yang mempunyai otoritas sosial tinggi di suatu desa.

Jadi dalam membuat citra baik dalam struktur sosial masyarakat, tidak hanya dibutuhkan citra personal dari seorang calon dan atau kepala pemerintahan atau wakil rakyat akan tetapi faktor lain secara tidak langsung mengikuti. Pada interaksi sosial-politik dewasa ini, faktor *social-capital* saja tidak cukup tanpa juga dibarengi dengan faktor *economical-capital* dan *political-capital*.

## **B. Saran-saran**

Guna lebih memberikan suatu kesan yang baik atas penelitian ini, maka saya secara garis besar memberikan pandangan umum atau saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi partai politik setempat hendaknya dapat lebih meningkatkan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Sumenep.
2. Bagi para tokoh politik di Kabupaten Sumenep hendaknya dapat melakukan kegiatannya dengan sehat.

3. Bagi kiai hendaknya lebih meningkatkan perannya sebagai tokoh agama dalam masyarakat.
4. Bagi masyarakat dalam memilih partai seharusnya memperhatikan visi dan misi para pasangan calon kepala daerah.
5. Bagi pemerintah hendaknya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilukada.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Al Badri, Abadul Aziz, *Peran Ulama dan Penguasa*. Solo: Pustaka Mantiq, 1987.
- Anwar, Syaefuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1999.
- Arifien, Tadjul R, *Sejarah Perjalanan DPRD dan Perjuangan Rakyat Sumenep 1945-1950*, Sumenep: Bagian Humasy dan Pulikasi, 2008.
- Arikunto, Sukarmi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azis, Aceng Abdul Dy, dkk, *Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007).
- Bekker, Anton, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bruinessen, Martin Van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Chufron Sirodj, Ahmad, 2008. *Peran dan Posisi Kiai di Tengah Masyarakat Madura*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama (tidak diterbitkan).
- Damam, Rozikin, H. *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yoyakarta: Gama Media, 2001.
- Denzin, K, Norman dan Lincoln, Yvonna S, 2009. *Handbook of Qualitative Research (terj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hasan, A., Syamsul, *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

- Hefni, Moh, "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato" *KARSA Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XI, 2007.
- Hidayat, Komaruddin, *Politik Panjat Pinang: Di Mana Peran Agama*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Hilmi, Masdar. *Islam Profetik; Substansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Huda, Nur, *Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Khaldun, Ibn. *Mukaddimah Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo, terjemahan, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Riset dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kontowijoyo, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Maliki, Zainuddin. *Agama Priyayi; Makna Agama di Tengah Elit Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Miriam, Budiharjo, Prof., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Moesa, Maschan, Ali, *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta: Sypress, 1999.
- Noer, Delian, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nurhasim, Ahmad dan Nur Kholik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004.
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Paul Johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terj.)*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Ritzer, George dan, Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern (terj.)*, Jakarta: Kreasi Kencana. 2004.

- Robert Hefner, "The Politics of Popular Art: Tayuban Dance and Culture Change in East Java", *Indonesia*, Vol. 43 April, 1987.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kharima Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Salossa, S. Daniel, *Pilkada Langsung Menurut Menurut Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.
- Scharf, Betty R, *Kajian Sosiologi Agama (terj.)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Schmandt, J. Henri, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Suseno, Fran Magnis, *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Syamsul Arifin, As'ad, *NU dalam Tantangan*, Jakarta: Al Kautsar, 1989.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004,
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU Apa NU Dibdohi, Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, dkk., *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Warsito, Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Weber, Max, *Sosiolog.(terj.)*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2006.
- Zulkarnain, Iskandar, Drs. H.MM (dkk), *Sejarah Sumenep*, Sumenep:DISPARBUDPORA, 2010.

### **Internet dan Media Massa**

<http://mediamadura.wordpress.com/2011/05/19/adat-dan-kepribadian-orang-madura>. diakses tanggal 14 Nopember 2011, jam 03.37.

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemi lu/2\)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemi lu/2)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf), diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 45.

<http://www.smpn1.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0x MTE5NA%3D%3D>, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 21.

[http://www.sumenep.go.id/berita\\_c.php?pid=11234](http://www.sumenep.go.id/berita_c.php?pid=11234), diakses pada 20 Maret 2011, jam 20:03.

<http://www.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289cHJvJmdvdG89cmFqYQ%3D %3D> diakses pada 24 Maret 2011, jam 4:22.

KOMPAS edisi Jumat, 16 April 2010.

KOMPAS edisi Jumat, 19 Maret 2010.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA